

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PROSEDUR CERAI TAKLIK DITINJAU
MENURUT SEKSYEN 47 (PASAL 47) ENAKMEN
UNDANGUNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU
TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

NUR AZRIL HILMI BIN NOR AZMAN 11720114930

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU 1441 H/2020 M**



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 Mengenai Prosedur Cerai Taklik**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azril Hilmi Bin Nor Azman

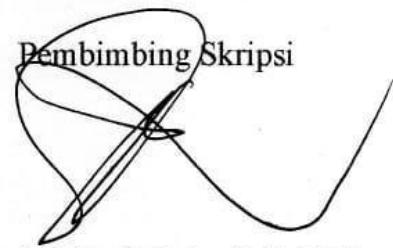
Nim : 11720114930

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Pembimbing Skripsi


Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 969 1112 2005011006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PROSEDUR CERAI TAKLIK DITINJAU MENURUT SEKSYEN 47 (PASAL 47) ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU TAHUN 2017”, yang ditulis oleh:

Nama : NUR AZRIL HILMI BIN NOR AZMAN
 NIM : 11720114930
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PROSEDUR CERAI TAKLIK DITINJAU MENURUT SEKSYEN 47 (PASAL 47) ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU TAHUN 2017”, yang ditulis oleh:

Nama : NUR AZRIL HILMI BIN NOR AZMAN
 NIM : 11720114930
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag



Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy



Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag



Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag



Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



ABSTRAK

Nur Azril Hilmi bin Nor Azman (2021): Analisis Prosedur Cerai Taklik Ditinjau Menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh prosedur cerai taklik menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 di mana segala pelanggaran taklik akan memberikan hak kepada isteri untuk membuat gugatan di Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama). Mahkamah akan memeriksa gugatan tersebut sesuai yang diatur oleh Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam. Hak dan kepentingan wanita dipertahankan dan dilindungi menurut pelaksanaan taklik yang diatur di negeri Terengganu. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana prosedur cerai taklik yang diatur dalam Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 dan analisis hukum Islam terhadap prosedur cerai taklik menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum Islam normative, dimana suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi kepada dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya. Dari pengeolahan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan data referensi baik berupa literature maupun partikel-artikel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan kajian yang penulis lakukan penetapan hukum dalam seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam adalah sangat relevan menurut hukum Islam di Malaysia yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

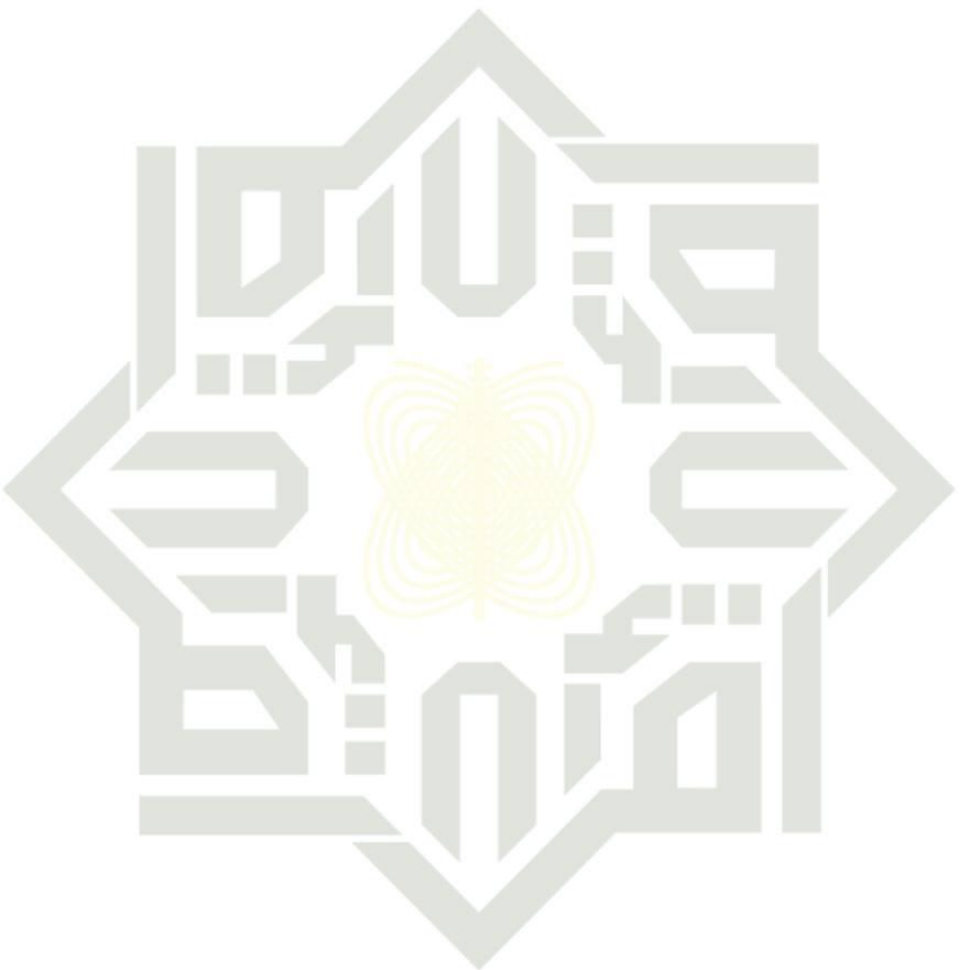
mengamalkan mazhab Syafi'i. Ini karena proses penetapan hukum Islam di Pengadilan harus selari dengan perkembangan dunia masa kini.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Prosedur Cerai Taklik Ditinjau Menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017**”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di redhoi oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Nor Azman bin Ghani dan Ibunda tercinta dan tersayang Zaidah binti Ismail yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Sekaligus selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
5. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi ini yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari sampai selesai karya ilmiah ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku Penasihat Akademik
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Shakir Ramadhan, Siti Shuzriani Helni Puswita Sari, Nur Amanina, Nur Azira dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, penulis memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 25 Juni 2021

Penulis

NUR AZRIL HILMI BIN

NOR AZMAN

NIM: 11720114930



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Batasan Masalah	5
Rumusan Masalah	6
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
Metode Penelitian	7
Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM TENTANG ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU	12
A. Latar Belakang Perundang-undangan Syariah Negeri Terengganu	12
B. Sejarah Berdirinya Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu	26
C. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu	32
D. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu	34
BAB III	38
TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK	38 A.
Definisi Taklik Talak	39
C. Rendapat Ibn Hazm dan Ulama Shi'ah Ja'fariyah	44
D. Pandangan Ibn Taimiyah	47
BAB IV	50
ANALISIS PROSEDUR CERAI TAKLIK DITINJAU TERHADAP SEKSYEN 47 (PASAL 47) ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU TAHUN 2017	50
A. Cerai Taklik Menurut Undang-Undang Keluarga Islam	50
B. Prosedur Cerai Taklik dalam Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Islam Terengganu 2017	54
C. Analisis Terhadap Prosedur Cerai Taklik Menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017	61
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

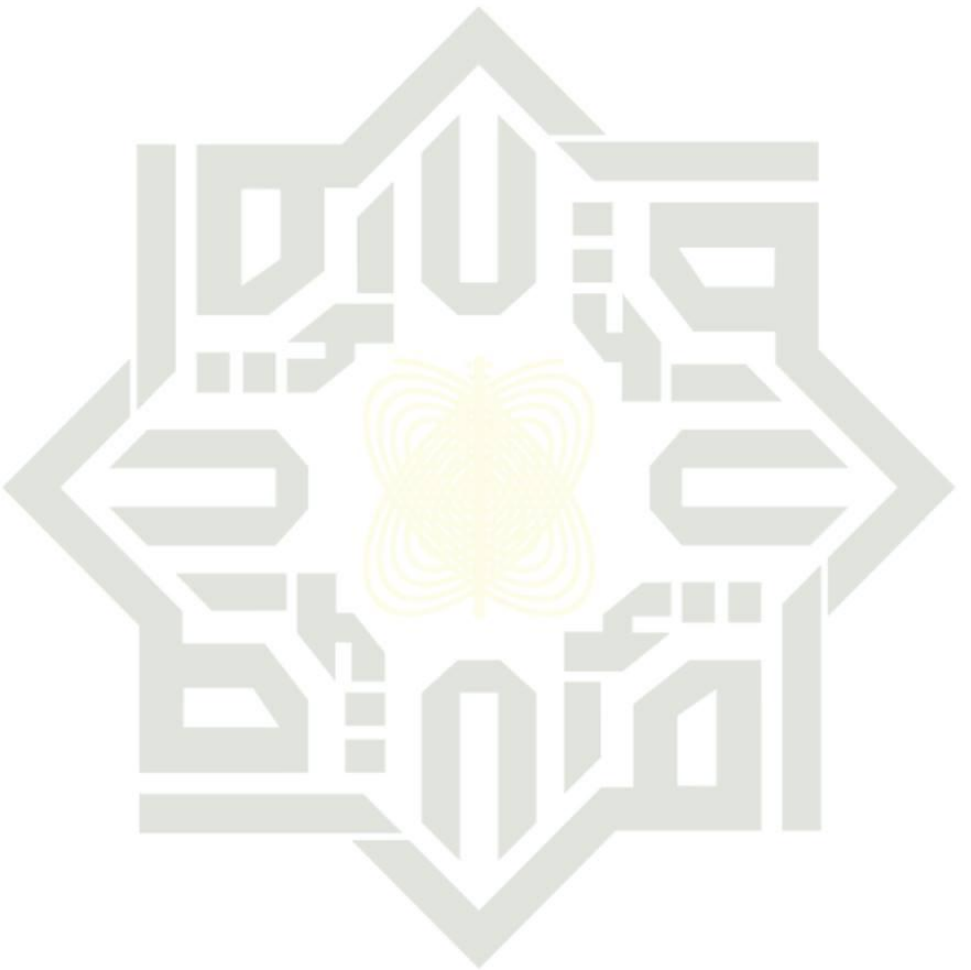
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran 69

DAFTAR KEPUSTAKAAN 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat naqaqatun thaaliqun, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat asiirun muththaliqun, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i.¹

Talak disyariatkan dengan Al-Kitab, sunnah dan ijma'. Dari Al-Kitab adalah firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٍّ حُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" (Yogyakarta, Gema Insani, 2010), hlm.18.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (229).²

Juga berdasarkan sunnah adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ هَالِلٌ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ هَالِلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 أَبَعَضِ الْوَالِدِ عِنْدَ هَالِلِ بْنِ هِطَلٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ
 الْوَحَّاحُ , وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal

Taklik Talak diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Terengganu Tahun 2017 di Terengganu yang merupakan salah satu negara bagian

² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" (Yogyakarta, Gema Insani, 2010), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di Malaysia guna untuk melindungi hak dan kepentingan wanita.³ Menurut Ibrahim, aturan taklik di Malaysia terbagi dua yaitu taklik yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang keluarga islam di setiap negeri (taklik resmi) dan taklik yang dilafazkan oleh suami sesuai dengan pilihannya sendiri. (taklik lisan)⁴

Taklik resmi dibaca oleh suami kepada isteri di depan naib kadi setelah selesai akad nikah. Lafaz taklik itu dicatat dalam perakuan taklik atau buku nikah. Satu salinan perakuan atau buku nikah tersebut akan diberikan kepada suami atau isteri sebagai bukti taklik resmi yang telah dibacakan oleh suami kepada isterinya. Taklik resmi di setiap negeri terfokus kepada tiga hal yaitu kegagalan suami membayar nafkah, isteri ditinggalkan suami dan kemudharatan dan keganasan oleh suami kepada isterinya. Ketiga-tiga hal tersebut adalah masalah utama yang sering dihadapi oleh isteri dalam masa perkawinannya bersama pasangan.⁵

Segala pelanggaran taklik resmi oleh suami akan memberikan hak kepada isteri untuk membuat gugatan di Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama). Mahkamah akan memeriksa gugatan tersebut sesuai prosedur yang diatur oleh Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 yaitu:⁶

³ Mahmud Saedon Awang Othman, “*Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam*” dalam Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean, ed. Abdul Moni Yaacob (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 2000), hlm. 211.

⁴ Ibrahim Lembut, “*Kaedah Ta’liq Talak di Mahkamah Syariah*”, *Jurnal Hukum* xxi (2000), hlm. 148

⁵ Raihanah Abdullah, “Perceraian dan Mahkamah Syariah”, dalam *Wanita dan Perundangan Islam*, ed. Raihanah Abdullah (Selangor: Ilmiah Publishers Sdn Bhd, 2001), hlm. 104.

⁶ Mazlan Abd Manan, “Kesalahan Matrimoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Selangor” (disertasi sarjana, Universiti Malaya, 2010), hlm. 55

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seseorang yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta'liq yang dibuat selepas

berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku;

2. Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyasatan mengenai sahnyanya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah menurut Hukum Syara', hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian itu dan menghantar satu Salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.⁷

Hak dan kepentingan wanita dipertahankan dan dilindungi menurut pelaksanaan prosedur taklik resmi yang diatur di negeri tersebut.

Selain taklik resmi, terdapat satu lagi pengamalan taklik lain di Malaysia iaitu taklik lisan. Taklik lisan adalah lafaz taklik suami dengan pilihannya sendiri tanpa berkaitan dengan permasalahan dalam lafaz taklik resmi.⁸ Suami bebas melafazkan apa saja taklik tersebut apakah diucapkan dengan kehendaknya sendiri seperti suami menghalang isteri keluar dari rumah atau taklik tersebut diucapkan dengan permintaan isteri seperti isteri menetapkan kepada suami agar tidak berpoligami.

Taklik lisan tidak diwajibkan kepada setiap pasangan seperti taklik rasmi, namun pengamalannya wujud dalam masyarakat Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan menerusi penelurusan terhadap arsip-arsip kasus perceraian luar

⁷ Lihat Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 (Seksyen 47)

⁸ Ibrahim Lembut, "Kaedah Ta'liq Talak di Mahkamah Syariah", *Jurnal Hukum* xxi (2006), hlm. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahkamah di mahkamah syariah. Mahkamah mengklasifikasikan pengucapan taklik tersebut

sebagai perceraian luar mahkamah seperti yang diatur dalam seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984:

Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.⁹

Hal ini karena pengucapan taklik tersebut berlaku di luar mahkamah dan tanpa kebenarannya. Perceraian luar mahkamah merupakan suatu kesalahan yang diatur dalam enakmen ini dan pihak suami boleh dihukum dengan biaya sampai dengan RM 1000.00 ringgit (Rp. 3.000.000) atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut yang penulis tuangkan di dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Prosedur Cerai Taklik Ditinjau Menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017**”.

⁹ Seksyen 124, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303/1984)

B. Batasan Masalah

Untuk menjelaskan bagaimana analisis prosedur cerai taklik menurut Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur cerai taklik yang diatur dalam Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.
2. Analisis aturan prosedur cerai taklik menurut Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur cerai taklik di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017
2. Untuk mengetahui analisis terhadap prosedur cerai taklik dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2017.
3. Sebagai wadah penyampai informasi kepada masyarakat Islam tentang hukum cerai taklik.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab undang-undang, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja. Selain itu penelitian ini dilaksanakan terhadap kajian kes yang berlaku di Negeri Terengganu, Malaysia. Penulis memilih lokasi ini adalah karena kasus itu ada di Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu dan penulis sendiri berasal dari provinsi tersebut dan memudahkan penulis untuk membahasnya.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang didapati langsung dari pustaka seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017. Manakala lapangan pula adalah data kasus-kasus cerai taklik yang diambil di Mahkamah Rendah Syariah di Terengganu, Malaysia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut:

- a. Observasi; yaitu dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan tanya jawab ketua hakim pengadilan.

5. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.

6. Metode Penulisan

Setelah data yang terkumpul dalam penelitian dianalisa, maka selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode berikut:

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul diolah berdasarkan pengamatan yang mendalam dan analisis berdasarkan bahan hukum primer. Penulis menerapkan metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

F Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama yang menyerupakan bab pendahuluan diungkapkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

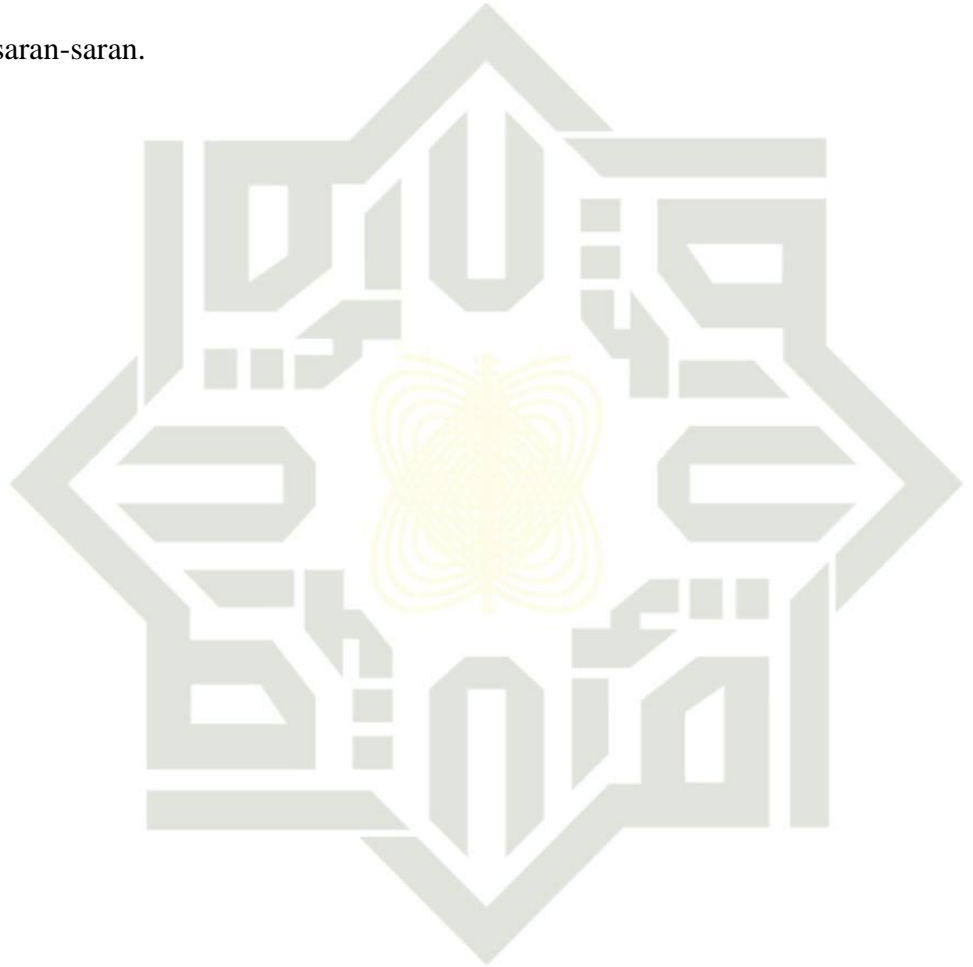
Bab kedua dipaparkan tinjauan umum tentang penelitian yang terdiri dari profil Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, Mahkamah Rendah Syariah Besut, Terengganu dan enakmen undang-undang keluarga Islam Terengganu yaitu latar belakang, visi, misi, dan isi undang-undang dan enakmen secara umum.

Pada bab ketiga disajikan uraian mengenai syariat Islam tentang perceraian taklik yang meliputi pengertian menurut bahasa dan istilah, tinjauan umum tentang hukum perceraian taklik, pendapat ulama dahulu dan sekarang tentang perceraian taklik dan dasar hukum menurut al-Quran, hadis dan pendapat ulama.

Selanjutnya pada bab keempat penulis meneliti permasalahan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur perceraian taklik di dalam Enakmen

Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 yang dapat memudahkan tuntutan cerai taklik oleh isteri terhadap suaminya, bagaimana analisis prosedur perceraian taklik di Terengganu, Malaysia menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017.

Terakhir adalah bab kelima yang merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM

TENTANG ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TERENGGANU TAHUN 2017

Latar Belakang Perundang-undangan Syariah Negeri Terengganu

Pada waktu Terengganu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin III (1881-1918), pelaksanaan hukum Islam di Terengganu cukup luar biasa. Hukum Islam dijadikan sebagai Hukum wilayah dan Sultan telah mengatur administrasi Mahkamah, merumuskan Aturan Mahkamah (Pengadilan) dan Undang-undang dasar wilayah tersebut.

Undang-undang Mahkamah telah dibuat dan diluluskan oleh Majlis Musyawwarah Negeri sejak negeri Terengganu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin III. Undang-undang ini dibuat mengikut al-Qawaid alSyariah atau Qawaid al-Fiqhiyyah, mengandungi tiga belas (13) bab, meliputi tugas-tugas pegawai-pegawai dan kakitangan Mahkamah, hukum dan anggaran Mahkamah.

Pada keseluruhannya undang-undang Mahkamah ini mengikut sistem kehakiman Islam. Disebutkan pada waktu itu bahwa undang-undang ini ternyata begitu kuat dan tersusun rapi dan mengatur administrasi dan perjalanan Mahkamah di seluruh Terengganu di atas dasar dan prinsip kehakiman Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman penjajahan Inggris, usaha penjajah menerapkan hukum Inggris dan mengesampingkan hukum Islam yang telah dilaksanakan di negeri ini berawal sejak Inggris mendirikan *Joint Court* yang diketuai oleh *British Agent* untuk membicarakan, diduga kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang Inggris atau warga Inggris saja. Ada juga hakim-hakim dari bangsa Melayu yang ditunjuk bertugas di Mahkamah *Joint Court* ini. Pengadilan ini memiliki kewenangan membicarakan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesalahan pidana dan perdata.¹⁰

Penjajah Inggris juga telah membuat tanggapan bahwa hukum Islam yang ada dan berjalan di Terengganu pada saat itu sebagai “The Impractical Requirements of Muhammadan Law” dan sulit dilaksanakan. Penjajah Inggris berpendapat hukum Islam tersebut harus diganti dengan hukum Inggris. Ketika pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah (1920-1942), dia telah melakukan perubahan struktur organisasi dan kewenangan Departemen Agama Islam Negeri atas saran Inggris dan diganti dengan hukum Inggris, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga masyarakat muslim.¹¹

Posisi administrasi agama dan hukum Islam tidak banyak mengalami perubahan ketika zaman penjajahan Jepang. Selepas penjajahan Jepang, penjajah Inggris terus berkuasa di Tanah Melayu setelah selesainya

¹⁰ Syahrul Zaman, *Zaman Pra-Sejarah Negara*, (Kuala Lumpur: TATI Education, 2002), h. 26

¹¹ *Ibid*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perang Dunia Kedua. Tindakan Inggris yang paling efektif adalah

mengubah struktur pemerintahan agama Islam dan Hukum Islam yang dulunya wujud, dengan mendirikan Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, serta membuat hukum yang memiliki kewenangan yang terbatas untuk dilaksanakan di Mahkamah Qadhi sesuai kehendak penjajah Inggris itu sendiri.¹² Hukum Inggris dilakukan di pengadilan umum yang mana kewenangannya meliputi semua orang baik Islam atau pun bukan Islam. Kewenangan pengadilan umum ini melebihi kewenangan Mahkamah Qadi, bahkan jika terjadi perselisihan antara hukum Islam dan Inggris, meskipun di dalam kasus yang melibatkan orang Islam, maka hukum Inggris yang akan dipakai. Sebelum tahun 1948, Mahkamah Qadhi telah ditempatkan di dalam struktur peradilan. Susunan pengadilan-pengadilan untuk administrasi undang-undang *mal* dan jinayah adalah seperti berikut yaitu Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Magistret Kelas Pertama, Mahkamah Magistret Kelas Kedua, Mahkamah Qadhi dan Mahkamah Penghulu.¹³

Pada tahun 1948, melalui *Courts Ordinance*, pemerintah British telah mendirikan sistem peradilan publik unuk Federal dan telah meninggalkan Mahkamah Qadhi. Dengan demikian, melalui *Courts*

¹² *Ibid*, h. 57.

¹³ Rafiah Salim, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ordinance ini, Mahkamah Qadhi dipisahkan dari pengadilan umum. Setelah Malaysia didirikan pada 16 September 1963, Konstitusi Federal meliputi

Sabah dan Sarawak. Konstitusi Federal menggambarkan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah diletakkan di bawah

kewenangan negeri bagian (Provinsi). Bagi meningkatkan kedudukan dan taraf Mahkamah Syariah Undang-Undang Pentadbiran hukum Syarak telah direvisi berkali-kali dengan mewujudkan beberapa undang-undang baru seperti berikut:

1. Undang-Undang Keluarga Islam
2. Undang-Undang Jenayah Syariah
3. Kanun Acara Mal
4. Kanun Acara Jenayah Syariah
5. Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah
6. Undang-Undang Pentadbiran Perundangan Islam¹⁴

Aturan perundang-undangan yang mengatur hal terkait keluarga Islam dinamakan sebagai Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 dan pada tahun 2017 telah direvisi menjadi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017. Enakmen ini menjadi pedoman kepada Mahkamah Syariah di Terengganu bagi mengadakan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain

¹⁴ Fadiah Bin Sarnap, *Perundangan Islam: Sejarah Perkembangan Sumber dan Mazhabnya*, (Johor Bahru: Pernerajaan Jahabersa, 1998), h. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini mempunyai 10 bagian dan mengandungi

141 seksyen atau pasal. Berikut merupakan susunan dan daftar isi seksyen (pasal) yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017:

**ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(TERENGGANU) 2017
SUSUNAN SEKSYEN
BAHAGIAN I
PERMULAAN**

Seksyen

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Kecualian prerogatif
4. Pemakaian
5. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perkahwinan sah yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah

Enakmen ini

BAHAGIAN II

PERKAHWINAN

7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
8. Umur minimum untuk perkahwinan
9. Pertalian yang melarang perkahwinan
10. Orang daripada agama lain
11. Perkahwinan tidak sah
12. Persetujuan dikehendaki
13. Perkahwinan seseorang perempuan
14. Pertunangan

Permulaan kepada Perkahwinan

15. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
16. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
17. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim *Syarie*
18. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
19. Tempat perkahwinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Mas kahwin dan pemberian
21. Catatan dalam Borang Nikah
22. Poligami
23. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III

PENDAFTARAN PERKAHWINAN

24. Pendaftaran perkahwinan
25. Surat perakuan nikah
26. Melaporkan perkahwinan yang tidak sah atau tidak mematuhi Enakmen
27. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar, dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan *Ruju'* Orang Islam dan Jurunikah
28. Daftar Perkahwinan hendaklah disimpan
29. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Terengganu
30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang
31. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAHAGIAN IV

PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

32. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
33. Pelanggaran terhadap seksyen 30
34. Gangguan terhadap perkahwinan
35. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
36. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
37. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan
38. Kebenaran untuk mendakwa
39. Membetulkan kesilapan
40. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
41. Bukti

BAHAGIAN V

PEMBUBARAN PERKAHWINAN

42. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah
43. Pertukaran agama
44. Perceraian dengan *talaq* atau dengan perintah
45. Timbangtara oleh *Hakam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46. Perceraian *khul'* atau cerai tebus *talaq*
47. Perceraian secara *ta'liq* atau janji
48. Perceraian secara *li'an*
49. Hidup semula sebagai suami isteri atau *ruju'*
50. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh*
51. Anggapan mati
52. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
53. Pendaftaran perceraian
54. Membetulkan kesilapan dalam Daftar Perceraian dan Pembatalan
55. Pemeriksaan Daftar Perceraian dan Pembatalan
56. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah
57. *Mut'ah* atau pemberian suguhati kepada isteri yang diceraikan tanpa apaapa sebab mengikut Hukum Syarak
58. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh
59. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

BAHAGIAN VI

NAFKAH ISTERI, ANAK, DAN LAIN-LAIN

60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan kesan *nusyuz*
61. Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

62. Pentaksiran nafkah
63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan jaminan diberi bagi nafkah
64. Mengkompaun nafkah
65. Tempoh perintah nafkah
66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya
70. Menuntut tunggakan nafkah
71. Nafkah sementara
72. Hak tempat tinggal
73. Kewajipan menanggung nafkah anak
74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
75. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
79. Kewajiban menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga
80. Tempoh perintah bagi nafkah anak
81. Kewajiban menanggung nafkah anak-anak tidak sah taraf
82. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembayaran nafkah kepada kedua ibu bapa
83. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan Baitulmal atau institusi-institusi lain membayar nafkah

BAHAGIAN VII

PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanak

84. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
85. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan
86. Bagaimana hak penjagaan hilang keutamaan
87. Tempoh penjagaan
88. Penjagaan anak tidak sah taraf
89. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan
90. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Penjagaan ke atas Diri dan Harta

91. Orang yang berhak kepada penjagaan
92. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih
93. Pelantikan penjaga oleh Mahkamah
94. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
95. Penjaga bersama dengan ibu
96. Perubahan kuasa penjaga harta
97. Pemecatan penjaga
98. Jaminan hendaklah diberi
99. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
100. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
101. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan
102. Perintah khas mengenai harta kanak-kanak
103. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
104. Perintah larangan oleh Mahkamah
105. Penjaga bagi anak yatim
106. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawaipegawai kebajikan, dsb.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

107. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Relif-Relif Lain

108. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahanperpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah
109. Perintah tegahan
110. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian

BAHAGIAN VIII

PELBAGAI

111. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Terengganu
112. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Malaysia

Kesahatarafan Anak

113. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
114. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
115. Kelahiran selepas pengakuan bahawa *'iddah* telah tamat
116. Anak dari persetubuhan *syubhah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

117. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah
118. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan
119. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam *'iddah*
120. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa
121. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa 122.

Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

123. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Rayuan 124.

Rayuan

BAHAGIAN IX

PENALTI

125. Perkahwinan tanpa kebenaran
126. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
127. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
128. Tidak membuat laporan
129. Meninggal langsung isteri
130. Menganiaya isteri atau suami
131. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

132. Isteri tidak menurut perintah
133. Percubaan untuk menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
134. Bersekedudukan semula dalam tempoh '*iddah raj'i*'
135. *Ruju'* tanpa persetujuan isteri
136. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah
137. Percubaan dan subahat
138. Hukuman yang tidak ditentukan

BAHAGIAN X

AM

139. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah
140. Hukum Syarak
141. Pemansuhan dan Kecualian

B. Sejarah Berdirinya Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Di negara bagian Terengganu, Departemen Agama Islam bagi negeri tersebut dikenal dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri mengenai pengaturan Mahkamah Syari'ah, maka Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) harus didirikan secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebeheraan Personalia Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, JKSTR dipisahkan dari JHEAT berlaku mmulai 1 Januari 1988.¹⁵

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Negeri Terengganu ini mulai 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah.¹⁶ Meskipun begitu, di Kuala Terengganu yang mana ditempatkan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, *court house*-nya hanya satu saja

yang dapat diadakan. Kondisi ini hanya menyebabkan pelanggan Mahkamah Syariah mengeluh bahkan mendorong untuk terjadinya ketidakadilan karena penanganan kasus-kasus harus ditunda karena harus bergiliran di antara Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain dari itu kebanyakan sidang terpaksa dioperasikan di dalam Kamar Hakim.

Mulai 1 Januari 1988, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu didirikan dan dengan itu Mahkamah Syariah keseluruhan ditempatkan di bawah departemen baru ini dan terus terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu.¹⁷

¹⁵ Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu,

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu: Kuala Terengganu, 2004), jilid 57, h. 404. ¹⁸ *Ibid*, h. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai langkah jangka panjang, dalam bulan September 1990, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah mengajukan proposal agar sebuah bangunan khusus dibangunkan untuk penempatan Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu kepada Panitia Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Kantor Daerah dan Tanah Kuala Terengganu dan Gedung Jabatan Hal Ehwal Agama, Majlis Agama, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Perpustakaan Islam Terengganu, di bawah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Rekomendasi tersebut telah disepakati, Gedung Mahkamah Syariah Kuala Terengganu pada tahap awal disediakan oleh JHEAT¹⁸.

Pada 4 Desember 1994 Dewan Rapat Negeri di dalam pertemuannya telah membuat pertimbangan pada usulan pembangunan gedung baru Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Akhirnya pada 2 Mei 2000, Jabatan

Kehakiman Syariah telah beroperasi di gedungnya yang baru yang dinamakan

Bangunan Mahkamah Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100

Kuala Terengganu dan berdekatan Gedung Pengadilan (Sipil) Kuala Terengganu. Bangunan ini diresmikan oleh Duli Yang Mulia Al-Wathiqu

Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Al-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Sultan Terengganu yang ke-16.

Berdasarkan ketentuan di dalam Enakmen Pentadbiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(administrasi) Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bil. 12 Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut:¹⁸

1. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu;
2. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu saja);
3. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu;
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun;
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu;
7. Mahkamah Syariah Daerah Kemaman; 8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang; dan 9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu.

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta Unit *Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah bagiannya seperti berikut:¹⁹

¹⁸ Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, (Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), h. 4.

¹⁹ *Ibid*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagian Layanan Manajemen dan Sumber Manusia;
2. Mahkamah Rayuan Syariah;
3. Mahkamah Tinggi Syariah
4. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu;
5. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut
6. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun;
7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu;
8. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman;
9. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang; 10. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu; dan
11. Unit *Sulh*.

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002. Perakuan-perakuan Jawatankuasa tersebut kemudiannya dibawa ke dalam Rapat Komite Kemajuan Hal

Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-15 pada 4 Oktober 1986 dan disepakati, di antaranya membuahakan hasil rapat berikut:²⁰

1. Lulusnya Skema Layanan Pegawai Syariah (A19.00, A11.00, A10.00, kemudian dikategorikan dalam kelas L3, L2, L1). Skema Layanan

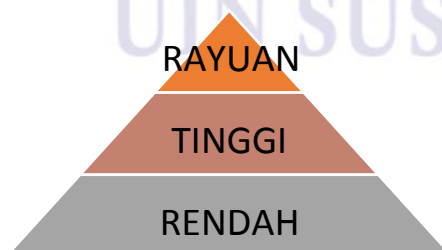
²⁰ Government of Terengganu, *Op. Cit*, h. 432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Syariah ini berlaku mulai 1 Februari 1985. Skema ini merupakan satu skema layanan baru untuk memenuhi kebutuhan layanan Kehakiman dan Perundangan Islam ke arah meningkatkan posisi dan sistem administrasi Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara. Pegawai yang ditunjuk ke dalam layanan Pegawai Syariah yang baru ini bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengadilan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan hukum Syar'i yang mana mereka berperanan sebagai Hakim-Hakim Mahkamah Syariah, Pejabat Kejaksanaan dan Pendaftar-Pendaftar Mahkamah.

2. Mulai tahun 1988, Mahkamah Syariah mula diasingkan daripada Jabatan hal Ehwal Agama Negeri-Negeri termasuk di negeri Terengganu. Mulai tahun 1989 juga penjawat jawatan Pegawai Syariah mulai mengisi posisi di Mahkamah Syariah dan kemudiannya di lembaga lainnya. Di Terengganu, pengadilan diisi dengan Pegawai Syariah mulai pada 1 November 1989.
3. Susun lapis Mahkamah Syariah mulai diperbaiki, yaitu dari dua tingkat kepada tiga tingkat, seperti berikut²¹:

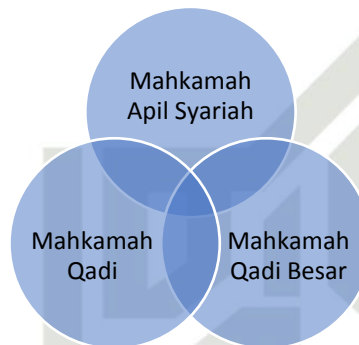


²¹ *Ibid*, h. 441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kepada Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara' 1955, Mahkamah Qadhi disusun menjadi salah satu aktiviti di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Kepala kepada kegiatan mahkamah ialah Qadhi Besar. Mahkamah Qadhi pula disusun dalam dua tingkat, seperti berikut²²:



Mahkamah Qadhi dipimpin oleh Qadhi Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agam Daerah juga ditunjuk dari kalanga mereka yang bertugas di bawah Departemen Urusan Agama, yang mana kemudian tertakluk di bawah Skema Pegawai Urusan Islam. Kepala Departemen bagi Jabatan Hal Ehwal

Agama adalah Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Bagian Otoritas dan Penuntutan juga merupakan salah satu kegiatan Jabatan Hal Ehwal Agama tunduk kepada Kepala Departemen yang sama dengan Mahkamah Qadhi iaitu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Qadhi Besar biasanya diangkat dari

²² *Ibid*, h. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan Pegawai Kanan yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama, meskipun tidak mahir dalam administrasi peradilaan Islam. Mahkamah Apil

Syariah biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari kalangan Pegawai Kanan Pemerintah yang telah pensiun, begitulah juga dengan ahliahli Mahkamah Apil. Orang-orang seperti pensiunan dari Jawatan Pegawai Daerah lazimnya diangkat menjadi anggota Mahkamah Apil.

Di Terengganu, Undang-undang Administrasi Hukum Syara' 1955 (Undang-undang Bilangan 4 Tahun 1955) telah disetujui untuk maksud menyusun administrasi, organisasi dan hukum untuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadhi Besar dan Mahkamah Qadhi.

Undang-undang ini berjalan kuatkasanya sehingga 30 Juli 1987. Mulai 1 Agustus 1987, undang-undang tersebut telah digantikan dengan Enakmen Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985.

Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Mahkamah Syariah Negeri Terengganu yang memiliki organisasi tersendiri dan berpisah dari organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) didirikan hasil dari keputusan Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 4 Oktober 1986²³. Hasil pertemuan tersebut telahpun dibawa ke pengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan disepakati dilaksanakan di Negeri Terengganu. Nama Mahkamah juga telah berubah dari nama Mahkamah Qadhi kepada Mahkamah Syariah. Julukan posisi pejabat yang memimpin satu-satu Mahkamah Syariah juga diubah dari nama Qadhi atau Qadhi Besar kepada Hakim atau Hakim Mahkamah Tinggi

Syariah atau Ketua Hakim Syari'e.

Dalam hubungan ini Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Personalia bagi Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah dengan melihat hasil dalam kertas pertemuan tersebut. Melalui persetujuan personalia Bilangan 1/1988 berdirilah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berlaku mulai 1 Januari 1988.

Di bawah Restrukturisasi Dewan atau Departemen Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah telah dipisahkan dari Departemen Agama Islam Negeri. Mahkamah Syariah adalah sebagai satu badan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, ianya memiliki kekuatan tertentu melalui amandemen hukum yang ada sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Tuan Mohamad, (Hakim ketiga Mahkamah Syariah Kuala Terengganu), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Terengganu.

pengadilan-pengadilan ini dapat mengawasi dan melaksanakan layanan pengadilan menurut hukum Syara' secara adil, efisien dan sistematis. Berdasarkan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam, (Terengganu)

1986. Mahkamah Syariah didirikan dalam tiga tingkat yaitu :

1. Mahkamah Rayuan Syariah
2. Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah
3. Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

Mahkamah Rayuan Syariah dipimpin oleh Ketua Hakim Syari'e. Mahkamah Tinggi Syariah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap Mahkamah Rendah Syariah Daerah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Tiga tingkat pengadilan ini diwujudkan melalui sebuah departemen yang bernama Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu di bawah Kepala Bekalan B 027 Negeri Terengganu²⁴. Petugas Pengawal bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu sekarang adalah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Tingkat-tingkat pengadilan itu dijadikan kegiatan dalam jabatan. Tiga tingkat Mahkamah Syariah ini atau kegiatan Jabatan Kehakiman Syariah pada umumnya memiliki dua bagian utama yaitu :

1. Bahagian Administrasi
2. Bahagian Mahkamah / Perundangan (Pengadilan / Hukum)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*, (Terengganu: Kuala Terengganu, 1992), h. 3

D. Misi, Visi, Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu adalah:

“Melaksanakan pembicaraan, manajemen pengadilan dan layanan dukungan secara professional, efisien dan sistematis berbasis hukum Syara’ dan undang-undang”.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah :

“Menjadi Lembaga Kehakiman Syariah Yang Berwibawa”²⁵.

Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah :

1. Menyelenggarakan penanganan kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan efisien berbasis undang-undang dan konsituti sesuai dengan hukum Syara’.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan staf dari aspek hukum dan manajemen
3. Menyediakan dan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dalam administrasi.
4. Menyediakan dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang terbaik dan memadai²⁶

Fungsi Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu adalah²⁷ :

²⁵ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*, (Terengganu: Kuala Terengganu, 1992), h 2.

²⁶ *Ibid*, h. 6



1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil sesuai hukum Syara' dan ketentuan hukum.
2. Menguatkuasa dan melaksanakan sistem peradilan Islam yang teratur dan efisien.
3. Mengurus kasus-kasus banding syariah secara sistematis dan efektif.
4. Mengelola permohonan pembagian warisan.
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih dan memadai.
6. Memberikan jasa konsultan, pertemuan dan perdamaian.

Begitu juga dengan tujuan dan peran Jabatan Kehakiman adalah²⁸ :

1. Mempertahankan hukum Islam yang diperuntukkan bagi pengadilan ini untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah S.W.T berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Menjalankan pemerintahan agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah menjamin kesejahteraan orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumahtangga.
5. Tempat rujukan untuk mendapatkan saran serta menyelesaikan masalah rumahtangga.

²⁷ *Ibid*, h. 10

²⁸ *Ibid*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan ingin menikah agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Tempat mengajukan banding dari pihak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah, perceraian, talak, *fasakh* dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain hal mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian warisan dan hal-hal terkait seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.
12. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan selalu berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengadopsi sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK

Islam membenarkan perceraian sebagai solusi kepada mempelai yang berdepan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Abdul Karim Zaydan, Islam membenarkan perceraian apabila ikatan perkawinan tidak boleh memberikan kebaikan kepada mempelai tersebut. Pernyataan ini tidak bermaksud Islam menggalakkan perceraian karena Ibnu Taimiyyah menyatakan hukum asal perceraian adalah haram tetapi ianya dibenarkan dalam keadaan tertentu. Oleh itu, perceraian tanpa sebab yang munasabah adalah perbuatan tercela dalam Islam.

Macam-macam perceraian dalam Islam yaitu talak, taklik talak, li'an, khuluk, dan fasakh. Talak adalah perceraian oleh suami dengan menggunakan pengucapan tertentu seperti talak atau seumpamanya seperti ucapan kinayah dan kuasa talak diberikan kepada suami menurut syarak. Suami juga boleh membuat permohonan li'an kepada mahkamah syariah (pengadilan agama) apabila suami merasa curiga dan tidak mengakui zuriat yang dilahirkan oleh istri atau suami menuduh istri berzina.²⁹ Hukum Islam mengimbangi hak untuk bercerai dengan memberikan hak kepada istri untuk memohon perceraian melalui khuluk dan fasakh. Khuluk adalah perceraian dengan permintaan istri apabila istri perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Wizarah al-Awqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 35:246-267., Mahmud 'Abd al-Rahman, *Mu'jam al-Mustalahat*, 3:174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah uang menurut jumlah yang diminta oleh suami atau jumlah yang menjadi persetujuan bersama suami dan istri.³⁰

Fasakh boleh dimohon oleh istri kepada pengadilan agama dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak seperti suami berbuat zalim kepada istri, suami mendapat penyakit tertentu dan lain-lain.

A. Definisi Taklik Talak

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.^{31 32} Definisi talak menurut istilah adalah melepaskan akad menggunakan lafaz yang tertentu seperti talak atau seumpamanya seperti lafaz kinayah.³³

Perceraian secara taklik termasuk dalam perceraian yang dibenarkan oleh Islam. Taklik menurut bahasa dapat dijelaskan menurut penelitian terhadap kata asal bagi sesuatu yang lain.³³ Definisi taklik menurut istilah diteliti menurut definisi yang diberikan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam dan fuqaha'. Taklik menurut istilah daripada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu adalah lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas melaksanakan akad nikah menurut hukum syarak dan penetapan undang-

³⁰ Wizarah al-Awqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 19: h. 234-259.

³¹ Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram, *Lisan al-'Arab* (al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t), 29: h. 2693.

³² Wizarah al-Awqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 29:5., Mahmud 'Abd al-Rahman, *Mu'jam al-Mustalahat*, 2: h. 419-434.

³³ Ibn Manzur, *Lisan al 'Arab*, 10:262., al-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakr, *Mukhtar al-Sittah* (Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1999), 1:216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang.³⁴ Segala pelanggaran taklik oleh suami memberikan hak kepada istri untuk membuat pengaduan dan menuntut haknya di mahkamah Syariah.

Jumhur fuqaha' yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan sebagian Hanabilah mendefinisikan taklik sebagai suami menyandarkan talak terhadap syarat yang akan berlaku pada masa depan.³⁵

Ibn Taimiyah mempunyai pandangan yang berbeda terhadap definisi yang diberikan oleh mayoritas ulama akan tetapi dia tidak memberikan definisi khusus terhadap taklik. Menurut penelitian terhadap keterangan dalam penulisannya seperti al-Fatawa al-Kubra dapat dipahami definisi taklik menurutnya ialah menyandarkan talak kepada sesuatu perkara pada masa depan dengan niat untuk bercerai.³⁶ Taklik yang diucapkan oleh suami dengan niat untuk bercerai dianggap sebagai taklik yang sebenar manakala taklik yang diucapkan bukan dengan niat untuk bercerai tetapi hanya tujuan untuk bersumpah diklasifikasikan sebagai sumpah dan tidak dinyatakan sebagai talak.³⁷ Ibnu Taimiyah menjelaskan taklik yang dilakukan dengan salah satu dari tujuan tersebut termasuk dalam sumpah yaitu taklik yang dilakukan untuk menguatkan tekad untuk melakukan sesuatu, menguatkan suatu larangan, membenarkan sesuatu kabar atau menafikannya.³⁸ Ini dikarenakan tujuan pengucapan taklik

³⁴ Pasal 2, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, (akta 303/1984)

³⁵ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin Ibn 'Umar, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), 3:341.

³⁶ Ibn Taymiyyah, Taqi al-Ddin Abu al-'Abbas Ahmad Ibn 'Abd al-Halim, *al-Fatawa al-Kubra* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 3:234.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah* (Bayrut: Muassasah al-Risalah, 1983), 7: 481.



seperti yang telah disebutkan di atas mempunyai persamaan dengan tujuan dan niat sumpah sebenar dibuat.

Definisi yang diberikan oleh mayoritas ulama terfokus kepada perkara yang dapat diperhatikan dengan sifat atau syarat yang disandarkan oleh suami terhadap talak pada masa depannya. Definisi Ibnu Taimiyah berbeda karena dia

berfokus kepada tujuan suami mengucapkan taklik. Beliau meletakkan niat untuk berakhlak sebagai prasyarat kepada taklik untuk dihukum talak. Jumhur ulama menolak pandangan Ibnu Taimiyah yang membedakan di antara taklik sebenar dan sumpah berdasarkan kepada perbedaan niat suami bahkan jumhur ulama menegaskan kedua-duanya termasuk dalam taklik tanpa wujud perbedaan di antara kedua-duanya.³⁹

Jumhur ulama turut menolak pandangan Ibnu Taimiyah yang menyatakan taklik yang dilakukan dengan tujuan untuk bersumpah dianggap sebagai sumpah hakiki yaitu tidak dijatuhkan talak apabila berlaku pelanggaran taklik, sebaliknya suami hanya perlu membayar kafarah sumpah. Ini karena mereka berpandangan taklik adalah sumpah secara majazi atau sindiran saja karena taklik sebenarnya terdapat daripada syarat dan mengandung arti sababiyah seperti sumpah.⁴⁰

Fuqaha' tidak membahas pembagian taklik tambahan secara khusus sebaliknya mereka memperincikan pembagian talaq yang disandarkan kepada syarat seperti suami berkata kepada istri "sekiranya kamu keluar dari rumah ini aku ceraikan kamu" sama ada dijatuhkan talak atau tidak apabila berlaku syarat

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dimashq: Dar al-Fikr, 1985): 447.

⁴⁰ Wizarah al-Awqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 12: 298.

tersebut. Perselisihan pandangan ini berlaku karena tidak terdapat nash yang jelas dalam al-Quran dan Hadist bagi menjelaskan terkait hal ini secara khusus. Perbedaan pendapat ulama berkesimpulan terkait hal ini dapat dilihat seperti berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kamim Riau

B. Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiyah Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah berpandangan talak jatuh apabila berlaku syarat yang telah disebutkan oleh suami⁴¹ pandangan mereka bersandarkan kepada ayat al-Quran:

الْهَاطَلَقُ مَ هَرْتَنِ فَاِمَسَا اَكُّ بِمَ عَرُوْفِ اَوْ تَسَرِي حُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَّلَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مَ هِمَا اَتِي تَمُوْهُ هِن شَيْئًا اِه لَ اَنْ هِيْخَافَا اِهَلَّ يَقِيْمَا حُدُوْدَ هَاللِّ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِهَلَّ يَقِيْمَا حُدُوْدَ هَاللِّ ۗ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيْمَا افْتَدَتْ ۗ بِهٖ تَلِّ اِكُّ حُدُوْدَ هَاللِّ ۗ فَلَ تَعَدُوْهُ هَا وَمَنْ هِيْتَعَدَه حُدُوْدَ هَاللِّ فَاَوْ لِبِكِّ هُمْ اِهَلَّ هَاطَلَقُ

Al Baqarah 2:229

Artinya: *Talaq (yang boleh diruju' kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (ruju' dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang*

⁴¹ Ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar*, 3:342., Abu al-Qasim, *al-Qawanin alFiqhiyyah*, 1:153., al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 4:514., al-Bahuti, *Kashfu al-Qina'*, 5:84.

baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talaq) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan

mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim

Jumhur ulama menjelaskan bahwa ayat di atas bersifat umum dengan tidak menyatakan kaedah yang tertentu dalam menjatuhkan talak.⁴² Talak ini tetap berlaku samaada dibuat secara langsung atau melalui taklik.

Pandangan mereka juga di dasari dengan hadits:

Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Orang Islam perlu berpegang dengan syarat mereka.⁴³

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, (Dimashq: Dar al-Fikr, 1985), 7:447.

⁴³ Abu Daud, Sulayman Ibn al-'Ash'ath, *Sunan Abi Daud* (Bayrut: Maktabah 'Asriyyah, t.t), 3:304, (Bab fi al-Sulh, no. hadith 3594)., al-Bayhaqi, Ahmad Ibn al-Husayn, *al-Sunan al-Kubra* (Bayrut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, t.t), 6: 131 (Bab al-Shart fi al-Shirkah wa Ghayih, no. hadith 11429).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadits di atas, jumbuh ulama berpendapat taklik adalah satu syarat yang diletakkan oleh suami untuk menjatuhkan talak. Syarat ini akan diperhatikan dan diterapkan oleh syarak selama syarat tersebut tidak bertentangan ketetapanannya. Talak akan dikenakan apabila syarat yang telah diucapkan oleh suami telah berlaku. Di antara athar yang menyokong pandangan mereka ialah:

Daripada Ibrahim:

Artinya: Daripada Ibrahim bahwa dia telah berdepan dengan kejadian seorang laki-laki telah berkata kepada istri: kamu aku ceraikan selepas berlalunya setahun. Maka beliau menjawab: Kamu boleh bersamanya sehingga cukup setahun⁴⁴

Athar di atas jelas menunjukkan bahwa taklik yang diucapkan oleh suami akan mensabitkan talak apabila berlaku syarat yang telah disebutkan suami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 7: 583, (Bab al-Talaq bi al-Waqt wa al-Fi'l, no. hadis 15091).

C. Pendapat Ibn Hazm dan Ulama Shi'ah Ja'fariyah

Ibn Hazm dan Ulama Shi'ah Ja'fariyah berpandangan taklik tidak akan menjatuhkan talak dalam kondisi apa pun.⁴⁵ Pandangan ini disandarkan kepada ayat al-Quran berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَهَلْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ مِنْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّ عَوُّهُنَّ وَسِرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيعًا ۗ

al-Ahzab 33:49

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّ قَوْلُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ هُنَّ وَأَخَصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا هَالِكًا رَبِّكُمْ لَنْ تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ هُنَّ وَلَنْ يَخْرُجَنَّ إِهْلَاهُنَّ أَنْ هِيَئَتِي نَبِيٍّ بِفِاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتَلِكُ حُدُودُ هَالِكٍ وَمَنْ

⁴⁵ Wahbah al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 7: 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هَيْتَعَدَهُ حُدُودَ هَالٍ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ⁴⁶ لَ تَدْرِي لَعَلَّ هَالٍ يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا

al-Talaq 65:1

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

Menurut Ibn Hazm berdasarkan dua ayat di atas, Allah menjelaskan talak hanya sabit kepada wanita yang belum disetubuhi dan telah disetubuhi.⁴⁶

Beliau menjelaskan tiada nash yang khusus menunjukkan taklik mensabitkan talak. Oleh itu, taklik tidak akan mensabitkan talak dalam kondisi apa pun. Ibnu Hazm dan Ulama Shi'ah Ja'fariyah berpendapat taklik adalah sumpah dan mereka menjelaskan tidak harus bersumpah selain menggunakan nama Allah berdasarkan hadits⁴⁷:

Daripada Ibn Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 479.

⁴⁶ Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-'Athar* (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t), 9: 358

⁴⁷ Wahbah al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 7: 448.

Artinya: Hendaklah bagi mereka yang ingin bersumpah, jangan bersumpah, melainkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah.⁴⁸

Berdasarkan hadits di atas, mereka menyatakan taklik yang dibuat tidak berdasarkan oleh syarak dan dianggap sia-sia karena menggunakan talak sebagai subjek untuk bersumpah.⁴⁹ Hal ini dikarenakan sumpah hanya dibenarkan menggunakan nama Allah saja. Pandangan mereka dikuatkan dengan athar:

Daripada Ibn Jurayj berkata: Ibn Tawus menceritakan kepadaku daripada ayahnya bahwa:

Artinya: Sumpah dengan menggunakan talak adalah batil dan tidak menjatuhkan talak.⁵⁰

Athar di atas jelas menunjukkan taklik dalam bentuk apa pun termasuk talak yang didasarkan kepada syarat tidak menggugurkan talak walaupun berlaku syarat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma' il, *Sahih al-Bukhari* (Bayrut: Dar Tuq alNajah, t.t), 5:42 (Bab Ayyam al-Jahiliyyah, no. hadith 3836)., Muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Bayrut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 3:1267 (Bab al-Nahyu 'an alHalaf bi Ghayr Allah, no hadith 1646).

⁴⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, op.cit, 9:477.

⁵⁰ al-San'ani, 'Abd Razzaq Ibn Humam al-Humayri al-Yamani, *al- Musannaf* (Bayrut: Maktabah al-Islami, t.t), 6:406 (Bab al-Talaq al-Kurh, no. hadith 11401).

D. Pandangan Ibn Taimiyah

Ibn Taymiyah berpendapat talak yang disandarkan kepada syarat oleh suami dengan niat untuk membubarkan perkawinan, mensabitkan talak apabila berlaku syarat tersebut.⁵¹ Taklik dilakukan dengan tujuan untuk bersumpah tidak mensabitkan talak sebaliknya hanya diwajibkan untuk membayar kafarah sumpah.⁵² Pendapat berdasarkan ayat al-Quran:

قَدْ فَرَضَ هَالِكٌ لَكَ تَحْلَةَ أَيِّ مَانِكُمْ وَ هَالِكٌ مَوْلَاكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

al-Tahrim 66: 2

Artinya: *Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

لَ يُؤَاخِذُكَ هَالِكٌ بِاللَّهْوِ فِي أَيِّ مَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكَ بِمَا عَقَدْتُمْ عَلَى أَيْمَانٍ فَكَفَّهَاتِ هَاطِعًا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْوَءُونَ أَوْ كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَدْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيِّ مَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظْ وَ

أَيِّ مَانِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ هَالِكٌ لَكُمْ أَيَّتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Al-Maidah 5:89

Artinya: *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu*

⁵¹ Ibn Taymiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, op.cit, 3: 245.

⁵² *Ibid.* h. 250

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi

mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Menurut Ibn Taimiyah. Berdasarkan kepada ayat-ayat di atas, kafarah sumpah diwajibkan apabila berlaku pelanggaran sumpah dan tidak ada hukuman lain dikenakan.⁵³ Taklik yang dilakukan dengan tujuan untuk bersumpah dianggap sebagai sumpah dan sebarang pelanggaran sumpah hanya diwajibkan untuk membayar kafarah sumpah. Pandangan ini dikuatkan dengan hadist:

Daripada Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Sesiapa yang bersumpah dengan sesuatu dan dia mendapati pilihan yang lebih baik dari sumpah tersebut, maka hendaklah dia memilihnya dan membayar kafarah sumpah.”⁵⁴

Beliau menjelaskan hadist di atas menunjukkan kafarah sumpah merupakan hukuman kepada sesiapa yang melanggar sumpah.⁵⁵

⁵³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, op.cit, 7: 447.

⁵⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, 3:1272, (Bab Nudib Man Halaf Yamin, fa Ra'a Ghayaha Khayran Minha, an Ya'ti Alladhi Huwa Khayr Wa Yukaffir 'an Yaminih, no. Hadith 1650)

⁵⁵ Ibn Taymiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, op.cit, 3: 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran taklik yang dilakukan dengan tujuan untuk bersumpah hanya mewajibkan kafarah sunpah. Pandangan ini dikuatkan dengan athar:

Daripada Ibn Abbas RA:

Artinya: Talak jatuh apabila disertakan dengan niat untuk membubarkan perkawinan dan pembebasan hamba dilakukan karena mengharapkan keredhaan Allah.⁵⁶

Ibnu Abbas menjelaskan talak hanya sabit apabila disertakan dengan niat untuk membubarkan perkawinan.⁵⁷ Talak sebenarnya tidak jatuh tanpa disertakan dengan niat untuk membubarkan perkawinan seperti orang yang bersumpah dengan talak dan orang yang dipaksa untuk membubarkan perkawinan.⁵⁸ Taklik yang dilakukan dengan tujuan untuk bersumpah tidak mensabitkan talak karena ianya dianggap sebagai sumpah.

Kesimpulannya, taklik menurut jumhur ulama mensabitkan talak apabila berlaku syarat yang telah disebutkan oleh suami. Ibn Hazm dan Ulama Shi'ah Ja'fariyah menganggap taklik tidak menjatuhkan talak dalam semua kondisi. Ibn Taimiyah berpendapat taklik dengan niat untuk bersumpah tidak menjatuhkan talak. Jelas di sini perbuatan taklik akan menjatuhkan talak apabila berlaku pelanggaran taklik berkenaan menurut

⁵⁶ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 7: 45 (Bab al-Talaq fi al-Ighlaq wa al-Kurh, wa al-Sakran wa al-Majnun).

⁵⁷ Ibn Taymiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, *op.cit.*, 3: h.236.

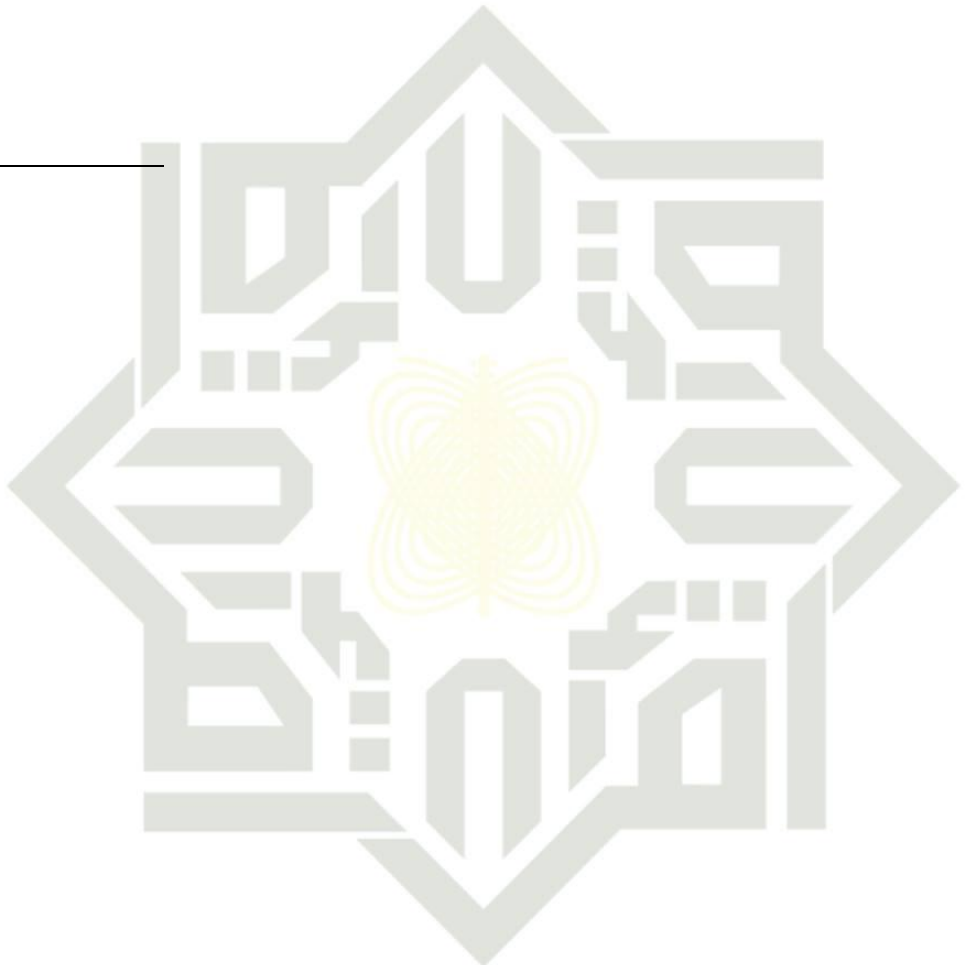
⁵⁸ *Ibid*, h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumhur ulama manakala Ibn Hazm dan ulama Shi'ah Ja'fariyah berpendapat taklik tidak menjatuhkan talak walaupun berlaku pelanggaran taklik tersebut. Ibn Taimiyah pula berpendapat taklik akan mensabitkan talak apabila taklik berkenaan dibuat dengan niat untuk membubarkan perkawinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Seksyen 47 (Pasal 47) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 2017 Mengenai Prosedur Cerai Taklik yaitu:

1. Prosedur Perceraian secara taklik diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia dan berlandaskan syarak

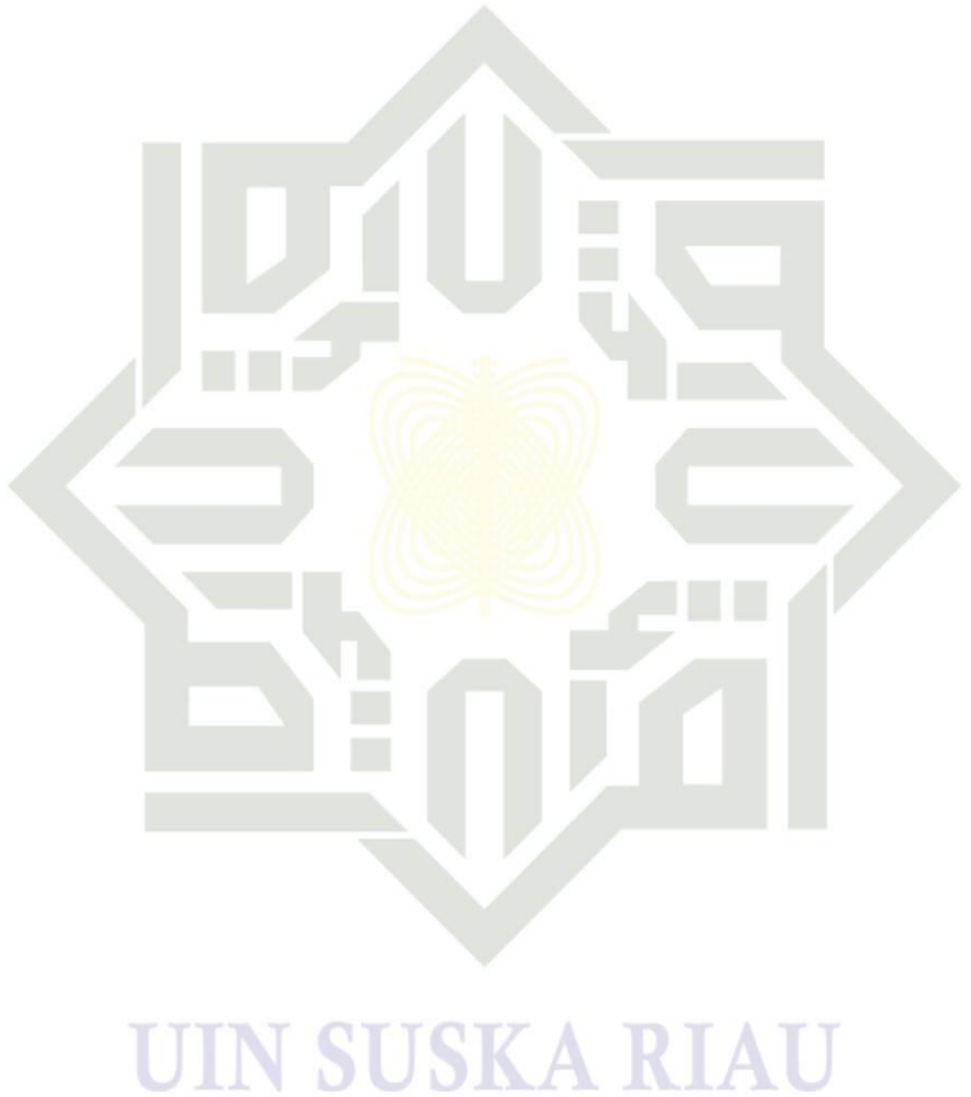
Menurut pandangan jumurh ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali telah sepakat mengatakan bahwa perceraian secara talak taklik adalah sah menurut syarak.

2. Segala pelanggaran taklik oleh suami memberikan hak kepada istri untuk membuat pengaduan dan menuntut haknya di mahkamah Syariah dan Pengamalan taklik di Malaysia diatur dalam Arahan Amalan No. 8 Tahun 2007 Amalan Perceraian Taklik dan pemohon haruslah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syariah.
3. Prosedur yang dipraktikkan ini sejajar menurut undang-undang perlindungan perempuan. Dengan adanya prosedur ini, dapat memudahkan gugatan kasus tuntutan taklik yang digugat oleh istri dengan alasan ditinggalkan suami, atau suami tidak mau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- hadir ke pengadilan tidak memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan
4. Prosedur dan ketetapan enakmen ini sesuai dengan hukum Islam karena lebih banyak masalah dalam ketetapan ini dari mudharatnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Undang-Undang Syari'ah haruslah mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan adil tanpa mengurangi hak suami atau istri.
2. Bagi masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang tidak lagi mampu mempertahankan bahtera rumah tangga yang dibina hendaklah melakukan proses perceraian menurut jalur hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena bercerai melalui Pengadilan Agama lebih mendatangkan kebaikan kepada semua pihak yang bersangkutan.
3. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudahmudahan pemikiran dari kedua kelompok di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Karim Zaydan, 1983, *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah*, Bayrut: Muassasah al-Risalah,
- Ala' al-Din al Kasani, 1986, *Bada' I al Sana' I*, v3,
- Arahan Amalan No. 8 Tahun 2007 Amalan Perceraian Ta'liq, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Putrajaya, 2007
- Enakmen 6 Tahun 2001 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001 Bahagan II, Pembuktian Bab 2, Keterangan Lisan.
- Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, 2004, Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu,
- Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 (Seksyen 21)
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 (Seksyen 47)
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017
- Fadilah Bin Sarnap, 1998, *Perundangan Islam: Sejarah Perkembangan Sumber dan Mazhabnya*, Johor Bahru, Perniagaan Jahabersa,
- Government of Terengganu, 2004, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, Kuala Terengganu, jilid 57
- Hamid Jusoh, 1990, *Pemakaian Undang-undang Islam kini dan Masa Depan nya di Malaysia*, Dalam Ahmad Ibrahim, *Al-Ahkam Undang-undang Masa Kini*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
- Ibn Manzur, 1999, *Lisan al 'Arab*, 10, al-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakt, *Mukhtar al-Ssihah* Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah,
- Ibn Qudamah, 1968, *Al Mughni*, v7,
- Ibn Rushd, 2004, *Bidayatul Mujtahid*, v3,
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Ddin Abu al-'Abbas Ahmad Ibn 'Abd al-Halim, 1987, *al-Fatawa al-Kubra* Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibrahim Lembut, 2006, “*Kaedah Ta’liq Talak di Mahkamah Syariah*”, *Jurnal Hukum* xxi
- Ismailiza Islam, 2004, *Cerai Ta’liq: Kajian Kes di Mahkamah Syariah Kota Bharu, Kelantan*, disertasi sarjana, Universiti Malaya,
- Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, 1992, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*, Terengganu: Kuala Terengganu,
- Kasus Permohonan Perceraian No. 11002-054-0024-2018, Mahkamah Syariah Kuala Terengganu.
- Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu
- Mahmud Saedon Awang Othman, 2000, *Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga Islam*, dalam *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean*, ed. Abdul Monir Yaacob Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM),
- Mazlan Abd Manan, 2010, “Kesalahan Matrimoni dalam Kes Perceraian di Luar Mahkamah dan Tanpa Kebenaran Mahkamah: Kajian di Mahkamah Syariah Selangor” disertasi sarjana, Universiti Malaya,
- Misrairi Sitoris, dkk, 2021, *Talak Taklik Menurut Fiqah: Analisis Pelaksanaannya Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Serta Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia*. *Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 33(1),
- Mohamad Azam, 2000, *Quo Vadis Kekuasaan dan Kedudukan Mahkamah Syari’ah di Malaysia Abad ke 20*, *Jurnal Syari’ah* edisi Juli, jilid 8
- Muhammad al Sharbini, 1994, *Mughni al Muhtaj*, Dar al Kutub al Kutub al Ilmiyyah, v4,
- Najibah Mohd Zin, 2012, *Korpus Undang-Undang Islam di Malaysia Semakan dan Cabaran*, Kuala Lumpur: Penerbit IKIM,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rafiah Salim, 1998, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,

Raihanah Abdullah, 2001, "Perceraian dan Mahkamah Syariah", dalam *Wanita dan Perundangan Islam*, ed. Raihanah Abdullah, Selangor: Ilmiah Publishers Sdn Bhd,

Ruzman Md. Noor, 2008, *Kedudukan Bayyinah, Syahadah dan Qarinah dalam Penggubalan Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia*, Jurnal Syariah Jil. 16 Bil. 2,

Seksyen 124, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303/1984)

Seksyen 84 Enakmen 6 Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu 2001

Siti Shamsiah, *Korpus Undang-Undang Islam di Malaysia Semakan dan Cabaran*, Penerbit IKIM, Kuala Lumpur, 2012,

Siti Zalikah Md. Noor, 2019, *Al Syariah Undang-Undang Keterangan Islam Edisi Kedua*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,

Syahrul Zaman, 2002, *Zaman Pra-Sejarah Negara*, Kuala Lumpur: TATI Education,

Wahbah Az-Zuhaili, 2010, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" Yogyakarta: Gema Insani,

Wizarah al-Awqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*